

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pengakuan kontruksi dalam pengerjaan yang diterapkan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor belum berjalan dengan baik. Nilai dari Kontruksi Dalam Pengerjaan yang sebesar Rp6.699.422.271 yang telah selesai dikerjakan dan dimanfaatkan namun belum jelas status penyelesaiannya dan juga tidak ada jurnal transaksi terkait dengan pengakuan atas ke-17 KDP, hal tersebut belum sesuai dengan PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan. Pengukuran kontruksi dalam pengerjaan dilakukan secara kontrak kontruksi dan telah sesuai dengan PSAP Nomor 08, sedangkan pengungkapan informasi nilai dari KDP baik mengenai rincian kontrak kontruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaiannya, nilai kontrak kontruksi yang telah dikeluarkan, uang muka kerja yang diberikan dan retensi telah diungkapkan pada akhir periode akuntansi, tetapi pengungkapan informasi KDP yang telah selesai dan dimanfaatkan senilai Rp6.699.422.271 dalam laporan keuangan belum dapat diakui sebagai aset tetap, hal tersebut tidak sesuai dengan PSAP Nomor 08 Tentang Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan belum dilakukan pemindahan nilai KDP ke akun aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Alor adalah tidak dilakukan pencatatan jurnal transaksi atas 17 KDP, belum adanya dokumen pendukung Serah Terima Pekerjaan PHO (*Provisional Hand Over*), Dasar hukum yang belum diterapkan dengan baik dan sumber daya manusia yang kurang kompeten.

## **6.2 Saran**

Dari kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor sebagai berikut :

1. Diharapkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor untuk melakukan pengakuan, pengungkapan dan pengukuran harus sesuai dengan PSAP Nomor 08 dan menerapkannya semaksimal mungkin.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan lebih dikembangkan lagi mengenai objek penelitian akuntansi kontruksi dalam pengerjaan untuk diperluas penelitian ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan tidak hanya terbatas atau terfokus pada satu Organisasi Perangkat Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta. Salemba Empat
- Abdul Halim, 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta. Salemba Empat
- Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019*
- Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siaran Pers Kupang, 14 Juli 2020 <https://ntt.bpk.id/bpk-memberikan-opini-wdp-untuk-lkpd-ta-2019-pemerintah-kabupaten-alor/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 jam 18:40
- Buletin Teknis. *Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor. 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*
- Huseun Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta; Rajawali Kuncoro, Mudrajad, 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Jefri Yanto Huru Ludji. *Analisis Perlakuan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017*
- Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019
- Prof. Dr Zaki Baridwan, M.Sc., Akt. *Intermediate Accounting*. Edisi kedelapan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 08 Tentang *Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan*
- Sitti Sohran Mandeha. *Studi Psap No. 08 Tentang Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan Pada pemerintah Kabupaten Enrekang*
- Zubaidah Rahman. *Analisis Perlakuan Akuntansi Kontruksi Pengerjaan Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo*